

**PERATURAN KALURAHAN KELOR**

**NOMOR 06 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN**

**TAHUN ANGGARAN 2023**

**PEMERINTAH KALURAHAN KELOR**

**KAPANEWON KARANGMOJO KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

****

LURAH KELOR

KAPANEWON KARANGMOJO KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN KELOR

NOMOR 06 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN

TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELOR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan) Kalurahan Kelor Kapanewon Karangmojo Tahun 2018-2024, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan setiap tahun;

 b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Kelor Kapanewon Karangmojo Kabupaten Gunungkidul tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2021;

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

 10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025;

 11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);

 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 52);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 4);

14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);

 15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gunungkidul;

 16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);

 17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 (Berita Daerah Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 37);

 18. Peraturan Desa Kelor Nomor 8 Tahun 2018 tentang RPJMDesa Tahun 2018-2024;

 19. Peraturan Desa Kelor Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Nomor 2.a Tentang Pungutan Desa Tahun 2020(Lembaran Desa Kelor Tahun 2020 Nomor 5);

 20. Peraturan Desa Kelor Nomor 2 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Kelor Tahun 2019 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KELOR

dan

LURAH KELOR

MEMUTUSKAN :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menetapkan | : | PERATURAN KALURAHAN TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN 2023 |

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan yang selanjutnya disebut RPJMKalurahan adalah rencana pembangunan kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
2. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang selanjutnya disebut RKPKalurahan adalah penjabaran dari RPJMKalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
3. Kalurahan adalah Kalurahan Kelor Kapanewon Karangmojo.
4. Pemerintah Kalurhan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kalurahan.
5. Lurah adalah Lurah Kelor Kapanewon Karangmojo.

Pasal 2

1. RKPKalurahan Tahun 2023 disusun berdasarkan RPJMKalurahan Tahun 2018-2024.
2. RKPKalurahan sebagaimana disebut ayat (1) mempunyai jangka waktu pelaksanaan terhitung sejak Januari 2023 sampai dengan Desember 2023.

BAB II

SISTEMATIKA RKPKalurahan

Pasal 3

1. RKPKalurahan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 disusun dengan sistematika :

Bab I Pendahuluan

Bab II Gambaran Umum dan Kebijakan Keuangan Kalurahan

Bab III Evaluasi Kegiatan Pembangunan

Bab IV Prioritas Pembangunan Kalurahan Tahun 2023.

Bab V Penutup

1. RKPKalurahan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 4

1. RKPKalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 dan pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya kegiatan Tahun Anggaran 2023.

Pasal 5

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Kelor.

Ditetapkan di Kelor

Pada tanggal 22 November 2022

LURAH KELOR,

SURATMAN

Diundangkan di Kelor

Pada tanggal 22 November 2022

CARIK KELOR,

SETYAWATI

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **LATAR BELAKANG**

            Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Perencanaan Pembangunan Desa merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, bahwa Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten.

            Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang selanjutnya disebut RKP Kalurahan merupakan penjabaran dari RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra kalurahan dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

            Rancangan RKPKalurahan disusun oleh Pemerintah Kalurahan, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Kalurahan, BPK dan masyarakat dalam Musrenbang Kalurahan, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan. Peraturan Kalurahan ditetapkan oleh Lurah selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Kalurahan oleh Carik.

            Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Kalurahan, RKP Kalurahan merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan dengan melibatkan seluruh masyarakat kalurahan dengan semangat gotong-royong. RKP Kalurahan merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Kalurahan selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Kalurahan tahun anggaran bersangkutan.

* 1. **DASAR HUKUM**

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

 10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025;

 11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);

 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 52);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 4);

14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);

 15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gunungkidul;

 16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);

 17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 (Berita Daerah Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 37);

 18. Peraturan Desa Kelor Nomor 8 Tahun 2018 tentang RPJMDesa Tahun 2018-2024;

 19.Peraturan Desa Kelor Nomor 2 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Kelor Tahun 2019 Nomor 2);

 20. Peraturan Desa Kelor Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Nomor 2 Tentang Pungutan Desa Tahun 2022(Lembaran Desa Kelor Tahun 2022 Nomor 3);

* 1. **TUJUAN**
	2. Agar Kalurahan memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap.
	3. Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di Kalurahan.
	4. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKalurahan).
1. **Visi dan Misi Kalurahan**

**Visi**

Visi adalah hal yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang kondisinya direpresentasikan dalam sejumlah sasaran hasil pembangunan yang dicapai melalui program-program pembangunan dalam bentuk rencana kerja**Visi Kalurahan Kelor adalah**

*TERWUJUDNYA KEHIDUPAN MASYARAKAT KALURAHAN KELOR YANG RELIGIUS, AMAN, HARMONIS, MAJU, ADIL, DAN TERTIB* ***(RAHMAT)****”*

**Misi**

Selain penyusunan visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh kalurahan agar tercapainya visi kalurahan tersebut. Visi berada di atas misi. Pernyataan visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di operasionalkan/dikerjakan. Sebagaimana penyusunan visi, misipun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Kalurahan Kelor, sebagaimana proses yang dilakukan maka misi Kalurahan Kelor adalah:

**Misi Kalurahan Kelor**

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dalam mewujudkan masyarakat Kelor yang beriman dan bertaqwa
2. Meningkatkan sistem keamanan swakarsa dalam upaya terciptanya rasa aman di masyarakat Kelor
3. Mewujudkan harmonisasi antar kelembagaan yang ada di Kalurahan Kelor sehingga terjalin sinergitas kinerja yang optimal
4. Mengembangkan kecakapan dan ketrampilan masyarakat Kelor menuju kemajuan dan peningkatan kesejahteraan
5. Optimalisasi pelayanan umum yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat Kalurahan Kelor
6. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat menuju tertibnya partisipasi dan peran serta masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan di Kalurahan Kelor

**BAB II**

**GAMBARAN UMUM DAN KEBIJAKAN KEUANGAN**

Keuangan kalurahan adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan kalurahan yang dapat dinilai dengan uang trmasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban kalurahan tersebut. Pengelolaan Keuangan kalurahan merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan kalurahan. Agar pengelolaan keuangan kalurahan lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan kalurahan sesuai amanah peraturan perundangan yang berlaku, salah satu rujukannya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dan diharapkan dapat mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya bagi pemerintah kalurahan bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan dalam menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) secara partisipatif dan transparan yang proses penyusunannya dimulai dengan lokakarya kalurahan, konsultasi publik dan rapat umum BPK untuk penetapannya. Struktur RAPB Kalurahan didalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

* + 1. **GAMBARAN UMUM KALURAHAN KELOR**
		2. **Demografi**

Kalurahan Kelor adalah salah satu Kalurahan yang ada di Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul dengan gambaran secara umum adalah sebagai berikut:

* + - 1. **Luas dan Batas Wilayah**
	1. Luas Kalurahan Kelor : 377.5425 Ha
	2. Batas Wilayah

Sebelah Utara : Kalurahan Ngawis

Sebelah Selatan : Kecamatan Semanu

Sebelah Barat : Kalurahan Wiladeg

Sebelah Timur : Kalurahan Ngipak

* 1. Pembagian Wilayah

Terdiri dari 7 Padukuhan membujur dari utara ke selatan sebagai berikut:

* + 1. Padukuhan Sudimoro
		2. Padukuhan Kelor
		3. Padukuhan Mengger
		4. Padukuhan Ngunut Lor
		5. Padukuhan Ngunut Kidul
		6. Padukuhan Slametan
		7. Padukuhan Karangayu
			1. **Kondisi Geografis**
1. Ketinggian Tanah dari Permukaan Laut : 200 – 300 M
2. Banyaknya curah hujan : 27 – 30 mm/th
3. Tipografi : Dataran Rendah
4. Suhu Udara Rata-Rata : 27o C
	* + 1. **Orbitasi**
5. Jarak dari Pusat Pemerintahan RI : 690 Km
6. Jarak dari Ibu Kota Provinsi : 51 Km
7. Jarak dari Ibu Kota Kabupaten : 7 Km
8. Jarak dari Ibu Kota Kecamatan : 3 Km
	* 1. **Potensi Ekonomi Kalurahan Kelor**

Potensi sumber ekonomi yang dimiliki Kalurahan Kelor sebagai berikut:

 **2.1.2.1Lahan Pertanian**

Lahan pertanian yang dimiliki Kalurahan Kelor adalah lahan kering tadah hujan yang tergantung pada daur iklim curah hujan.

Rincian lahan pertanian Kalurahan Kelor adalah sebagai berikut:

* + - 1. Pekarangan : 199,9135 Ha
			2. Tegalan : 177,6290 Ha

Lahan pekarangan dan tegalan pada umumnya diusahakan untuk kegiatan tanaman padi, polowijo dengan pola tanam tumpang sari/ tumpang gilir. Terdapat juga lahan tegalan yang dipergunakan untuk usaha tanaman perkebunan/ tanaman jangka panjang.

**2.1..2.1 Industri**

Sebagian besar industri di Kalurahan Kelor adalah industri yang berbasis hasil pertanian dan hutan sebagai berikut:

1. Industri Tempe : 14 Unit Usaha
2. Industri Tahu : 1 Unit Usaha
3. Anyam-anyaman bambu : 9 Unit Usaha
4. Mebeler : 7 Unit Usaha
5. Industri Kacang Mete : 4 Unit Usaha
6. Industri Kripik Pisang : 2 Unit Usaha
7. Industri Bakpia : 1 Unit Usaha

Terdapat ternak ayam potong 4 unit usaha dengan kapasitas kurang dari 20 ribu ekor ayam, ternak sapi dan kambing kurang lebih 60% dari semua Kepala Keluarga di Kalurahan Kelor.

* + 1. **Sosial Budaya**

2.1.3.1 Kependudukan:

Jumlah penduduk Kalurahan Kelor pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Dusun** | **Jumlah KK** | **Laki-laki** | **Perempuan** | **Jumlah Penduduk** | **Luas Wilayah** |
|  | Sudimoro | 154 | 264 | 255 | 519 | 63.247 |
|  | Kelor | 124 | 174 | 161 | 283 | 48.259 |
|  | Mengger | 85 | 109 | 140 | 249 | 49.018 |
|  | Ngunutlor | 139 | 182 | 196 | 378 | 49.238 |
|  | Ngunutkidul | 239 | 327 | 358 | 685 | 78.679 |
|  | Slametan | 183 | 286 | 257 | 543 | 68.142 |
|  | Karangayu  | 156 | 261 | 242 | 503 | 48.921 |
| **Jumlah**  | **1.099** | **1.614** | **1.619** | **3.233** | **377.825** |

Jumlah Penduduk Laki-laki : 1.614 Orang

Jumlah Penduduk Perempuan : 1.619 Orang

Jumlah Keseluruhan : 3.233Orang

Jumlah Kepala Keluarga : 1.099 Kepala Keluarga

**2.1.3.2 Aparatur**

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kalurahan Kelor pada Bulan Desember 2022 sebanyak 45 orang, jumlah Perangkat Kalurahan 18 orang dengan perincian 3 orang berpendidikan sarjana, 1 orang berpendidikan D3,12 orang berpendidikan SLTA, dan 2 orangg berpendidikan SLTP.

* + - 1. **Ketenagakerjaan**

Jumlah penduduk Kalurahan Kelor usia kerja 1.298 jiwa atau sebanyak 46% dan 780 jiwa bukan usia kerja. Jumlah pengangguran ada 294 jiwa atau 11%.

* + - 1. **Pendidikan**

Jenjang pendidikan yang ada di Kalurahan Kelor pada tahun 2022 meliputi TK dan SD. Adapun rincian dapat dilihat pada tabel berikut:

Jenis sekolah, jumlah guru dan siswa di Kalurahan Kelor pada tahun 2022:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Jenis Pendidikan | Negeri | Swasta  |
| Gedung (buah) | Guru (Org) | Murid (Org) | Gedung (buah) | Guru (Org) | Murid (Org) |
|  | TK | - | - | - | 2 | 5 | 30 |
|  | SD | 1 | 13 | 210 | - | 8 | - |

Pendidikan Luar Sekolah telah berdiri lembaga pendidikan luar sekolah diantaranya:

1. PKBM Galang Insani
2. KPMD
3. PAUD terdiri dari 3 Kelompok Bermain
	* + 1. **Kesehatan**

Secara umum derajat kesehatan masyarakat di Kalurahan Kelor pada tahun 2022 cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari indikator sebagai berikut:

1. Kesehatan Balita pada umumnya baik dan sehaat tidak ada kematian balita maupun gizi buruk karena secara rutin diadakan kegiatan posyandu di tiap padukuhan.
2. Kesehatan Ibu Hamil relative baik karena tidak ada kematian bagi ibu hamil.
3. Angka kematian, gizi buruk secara umum turun, karena kesadaran tentang kebersihan dan kesehatan meningkat.
	* + 1. **Umat Beragam**

Penduduk Kalurahan Kelor 1.816 Orang atau 63,7% beragama Islam, 13 Orang atau 0,45% Kristen dan 1.015 Orang atau 35,8% beragama Katholik.

* + 1. **Sarana dan Prasarana**
			1. **Transportasi**

Dalam peningkatan pelayanan transportasi lokal, perlu dilakukan pemerataan pembangunan jalan di seluruh wilayah Kalurahan Kelor secara proporsional. Sedangkan untuk transportasi antar Kalurahan perlu dilakukan kerja sama antar Kalurahan. Prasarana transportasi yang ada, selain menghubungkan antar padukuhan juga menghubungkan antar Kalurahan, jalan yang beraspal di Kalurahan Kelor hingga tahun 2022 baru 1.600 m, masih sangat diperlukan sekali jalan beraspal untuk memperlancar sarana transportasi karena sebagian besar masih jalan batu terjal.

* + - 1. **Sarana Kesehatan**

Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di Kalurahan Kelor perlu adanya sarana kesehatan yang memadai, sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik. Sarana Kesehatan yang ada di Kalurahan Kelor selain Posyandu yang tersebar di seluruh padukuhan juga ada Puskesmas Pembantu 1 unit.

* + - 1. **Sarana Peribadatan**

Di bidang keagamaan perlu adanya hubungan yang serasi dan harmonis antar umat beragama yang ada di Kalurahan Kelor, demikian juga sarana peribadatan perlu terus didukung dan disempurnakan sehingga menjadi lebih baik. Sedangkan jumlah sarana peribadatan sebagai berikut: Masjid sebanyak 5 buah, Mushola 3 buah,Gereja 1 buah.

**2.2Kondisi Pemerintahan Kalurahan**

2.2.1. Pembagian Wilayah Kalurahan

Kalurahan Kelor terdiri dari 7 Padukuhan yaitu :

1. Padukuhan Sudimoro,
2. Padukuhan Kelor,
3. Padukuhan Mengger,
4. Padukuhan Ngunutlor,
5. Padukuhan Ngunutkidul,
6. Padukuhan Slametan,
7. Padukuhan Karangayu,

Sedangkan lembaga kalurahan yang dibentuk untuk ikut serta membantu Pemerintah Kalurahan adalah :

1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMK),
2. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Padukuhan(LPMP)
3. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK),
4. Karang Taruna,
5. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kalurahan, serta
6. RT dan RW

2.2.2. Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan

|  |  |
| --- | --- |
|  | Pemerintah Kalurahan terdiri dari Lurah dan Pamong Kalurahan. Pamong Kalurahan terdiri dari Carik dan Pamong Kalurahan lainnya. |
|  | Pamong Kalurahan lainnya terdiri dari :a. Sekretariat;b. Pelaksana teknis;c. Pelaksana kewilayahan.Unsur kewilayahan adalah Padukuhan yang membantu Lurah dalam pelaksanaan tugas. |
|  | Sekretariat kalurahan terdiri dari :a. Tata laksana;b. Danarta; danc. Pangripta |
|  | Pelaksana teknis lapangan terdiri dari:a. Jagabaya;b. Ulu-ulu; danc. Kamituwa. |

Bagan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Kalurahan Kelor, mengacu Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan, digambarkan sebagai berikut :

LURAH

CARIK

KAUR

DANARTO

JAGABAYA

KAUR

PANGRIPTO

KAUR.

TATALAKSANA

KAMITUWO

ULU-ULU

DUKUH

KARANGAYU

DUKUH

SLAMETAN

DUKUH

NGUNUTKIDUL

DUKUH

NGUNUTLOR

DUKUH

MENGGER

DUKUH

KELOR

DUKUH

SUDIMORO

1. **Kebijakan Pendapatan Kalurahan**

Kebijakan pendapatan Kalurahan Kelor Tahun Berjalan 2022, Tahun Proyeksi 2023, disajikan dalam tabel 2.1. sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KODE REK**  | **URAIAN** | Tahun (Rp) |
|  |  | Berjalan 2022 | Proyeksi 2023 |
|  **1**  | **2** | 3 | 4 |
|  **1**  | **PENDAPATAN** |   |   |
| **1.1.** | **Pendapatan Asli Desa** |  **18.140.000**  |  **18.140.000**  |
| 1.1.1. | Hasil Aset Desa |  2.500.000  |  2.500.000  |
| 1.1.2. | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong |  1.350.000  |  1.350.000  |
| 1.1.3. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa |  14.290.000  |  14.290.000  |
|  **1.2**  | **Pendapatan Transfer** |  **1.788.968.200**  |  **1.788.968.200**  |
| 1.2.1. | Dana Desa (DD) |  774.623.000  |  774.623.000  |
| 1.2.2. | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah |  47.888.200  |  47.888.200  |
| 1.2.3. | Alokasi Dana Desa (ADD) |  648.457.000  |  648.457.000  |
| 1.2.4. | Bantuan Keuangan |   |   |
| 1.2.4.1. | Bantuan Keuangan APBD Provinsi |  238.000.000 |  238.000.000 |
| 1.2.4.2. | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten | 110.000.000 | 110.000.000 |
| **1.3.** | **Pendapatan Lain-lain** |  **20.000.000** |  **20.000.000** |
| 1.3.1. | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa |  13.000.000  |  13.000.000  |
| 1.3.2. | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa |  3.500.0000  |  3.500.0000  |
| 1.3.3. | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | - | - |
| 1.3.4. | Koreksi Kesalahan Belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di Kas Desa pada tahun anggaran berjalan | - | - |
| 1.3.5. | Bunga Bank | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 1.3.6. | Pendapatan Lain Desa yang Sah | 2.000.000 | 2.000.000 |
|  | **JUMLAH** |  **1.827.108.200**  | **1.827.108.200** |

* + 1. **Kebijakan Belanja Kalurahan**

Belanja Kalurahan Kelor Tahun Berjalan 2022, Tahun Proyeksi 2023, disajikan dalam tabel 2.2, sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kode Rekening** | **Bidang/Sub Bidang** | **Jenis Kegiatan** |  **Tahun Berjalan**  | **Proyeksi** |
| **2022** | **2023** |
| **01** | **BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA** |  | **644.846.888** | **751.777.534** |
| **10.01.** | **Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Kalurahan** |  | 685.660.120 | 685.660.120 |
| 01.01.01 |   | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah  | *40.950.000* | *40.950.000* |
| 01.01.02 |   | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong Desa | *477.926.000* | *477.926.000* |
| 01.01.03 |   | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | *32.441.436* | *32.441.436* |
| 01.01.04 |   | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) | *65.981.822* | *65.981.822* |
| 01.01.05 |   | Penyediaan Tunjangan BPD | *53.000.000* | *53.000.000* |
| 01.01.06 |   | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) | *4.260.862* | *4.260.862* |
| 01.01.07 |   | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | *11.100.000* | *11.100.000* |
| 01.01.08 |  | Penyediaan Oprasional Pemerintah Desa yang bersumber Dana Desa | *0* | *23.238.690* |
| **01.02** | **Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa** |  | **6.120.000** | **24.120.000** |
| 01.03 |  | Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor desa \*\*) | *2.020.000* | *2.020.000* |
| 01.02.90 |   | Pengadaan peralatan kerja | *-* | *8.000.000* |
| 01.02.91 |   | Pengadaan mebeleur | *-* | *7.000.000* |
| 01.02.92 |   | Penyediaan jasa perbaikan/servis mebeleur | - | 3.000.000 |
| 01.02.94 |   | Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional | *2.020.000* | *2.020.000* |
| 01.02.95 |   | Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja | 4.100.000 | 4.100.000 |
| 01.01.99 |   | Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintah Desa | *-* | *3.000.000* |
| **01.03** | **Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan** |  | **2.869.500** | **2.869.500** |
| 01.03.02 |   | Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa \*\*) | *1.000.000* | *1.000.000* |
| 01.03.90 |   | Penyusunan monografi desa | *955.000* | *955.000* |
| 01.03.91 |   | Pendataan keluarga/rumah tangga miskin | *2.500.000* | *2.500.000* |
| 01.01.99 |  | Lain-Lain  |  |  |
| **01.04** | **Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan** |  | **34.127.914** | **34.127.914** |
| 01.04.01 |   | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) | *425.000* | *425.000* |
| 01.04.02 |   | Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) | *4.287.500* | *4.287.500* |
| 01.04.03 |   | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | *3.455.000* | *3.455.000* |
| 01.04.04 |   | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) | *2.185.000* | *2.185.000* |
| 01.04.05 |   | Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa | *3.850.000* | *3.850.000* |
| 01.04.06 |   | Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan) | *1.315.000* | *1.315.000* |
| 01.04.07 |   | Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat | *1.612.000* | *1.612.000* |
| 01.04.08 |   | Pengembangan Sistem Informasi Desa | *58.140.000* | *58.140.000* |
| 01.04.90 |   | Penyusunan laporan keuangan bulanan/SPJ dan semesteran | *3.690.000* | *3.690.000* |
| 01.04.96 |   | Monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan | *1.050.000* | *1.050.000* |
| **01.05** | **Sub Bidang Pertanahan** |  | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 01.05.06 |  | Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan | - | 5.000.000 |
| 01.05.94 |   | Intensifikasi pemungutan pajak daerah /PBB | 5.000.000 | 5.000.000 |
| **02** | **BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA** |  | **528.094.886** | 908.033.386 |
| **02.01** | **Sub Bidang Pendidikan** |  | **45.160.000** | 165.160.000 |
| 02.01.01 |   | Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | *21.600.000* | *21.600.000* |
| 02.01.02 |   | Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst) | *9.000.000* | *9.000.000* |
| 02.01.04 |   | Pemeliharaan Sarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa | 6.050.000 | 6.050.000 |
| 02.01.08 |   | Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca) | *8.510.000* | *8.510.000* |
| 02.01.90 |  | Rehab/pembangunan gedung PAUD milik Desa | *-* | *120.000.000* |
| **02.02** | **Sub Bidang Kesehatan** |  | 65.063.386 | 71.063.386 |
| 02.02.02 |   | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) | *21.300.000* | *21.300.000* |
| 02.02.03 |   | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) | *5.825.000* | *5.825.000* |
| 02.02.04 |   | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | *6.283.386* | *6.283.386* |
| 02.02.09 |   | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD \*\* | *7.875.000* | *7.875.000* |
| 02.02.91 |   | Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) | - | 5.000.000 |
| 02.02.92 |   | Pembinaan taman obat keluarga (Toga) | *-* | *3.000.000* |
| 02.02.94 |   | Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD | *1.800.000* | *1.800.000* |
| 02.02.98 |   | Insentif kader kesehatan/KB | *19.980.000* | *19.980.000* |
| **02.03** | **Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** |  | 202.810.000 | 452.810.000 |
| 02.03.01 |   | Pemeliharaan Jalan Desa | *50.000.000* | *50.000.000* |
| 02.03.02 |   | Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukim/Gang | *-* | *30.000.000* |
| 02.03.09 |   | Pemelharaan Monumen/Gapura/Batas Desa | *63.000.000* | *63.000.000* |
| 02.03.11 |   | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman \*\*) | *-* | *150.000.000* |
|  02.03.12 |   | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani \*\*) | *-* | *50.000.000* |
| 02.03.14 |   | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) | *34.810.000* | *34.810.000* |
| 02.03.15 |   | Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Balai desa/Balai Kemasyarakatan \*\*) | 55.000.000 | 55.000.000 |
| 02.03.18 |  | Penyusunan Perencanaan tata ruang Desa | 0 | 20.000.000 |
|  |  |  |   |   |
| **02.04** | **Sub Bidang Kawasan Pemukiman** |  | 30.061.500 | 34.000.000 |
| **02.04.14** |  | **Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum,dll\*\*)** | 30.61.500 | 30.61.500 |
| 02.04.16 |   | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah \*\*) | - | 20.000.000 |
| 02.04.93 |   | Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengolahan sampah |   |   |
| 02.04.91 |   | Pemberian stimulan jamban sehat | *-* | *14.000.000* |
| **02.06** | **Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika** |  | 10.000.000 | 10.000.000 |
| 02.06.02 |   | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) | *10.134.000* | *10.134.000* |
| **02.08** | **Sub Bidang Pariwisata** |  | ***175.000.000*** | ***175.000.000*** |
| 02.08.02 |  | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan sarana prasarana Pariwisata Milik Desa\*\*) | *175.000.000* | *175.000.000* |
| **03** | **BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN** |  | **23.809.150** | **48.371.650** |
| **03.01** | **Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat** |  | 5.937.650 | 5.937.650 |
| 03.01.03 |   | Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa | *2.175.000* | *2.175.000* |
| 03.01.90 |   | Pembinaan kelembagaan Tangguh Bencana | *1.437.650* | *1.437.650* |
| 03.01.93 |  | Pembinaan Jaga Warga | *2.325.000* | *2.325.000* |
| **03.02** | **Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan** |  | 2.412.500 | 16.975.000 |
| 03.02.01 |   | Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa | 1625000 | 1625000 |
| 03.02.03 |   | Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) | *1.350.000* | *1.350.000* |
| 03.02.04 |   | Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Desa | *-* | *3.000.000* |
| 03.02.90 |   | Pemberian stimulant kegiatan keagamaan | *-* | *7.000.000* |
| 03.02.92 |   | Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa | *-* | *2.000.000* |
| 03.02.93 |   | Pembinaan dan pengembangan sanggar seni budaya | *-* | *2.000.000* |
| **03.03** | **Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga** |  | 2.000.000 | 3.000.000 |
| **03.03.90** |  | Pelaksanaan peringatan hari besar nasional | - | 1.000.000 |
| 03.03.93 |   | Operasional Karang Taruna | *2.000.000* | *2.000.000* |
| **03.04** | **Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat** |  | 13.459.000 | 22.459.000 |
| 03.04.02 |   | Pembinaan LKMD/LPM/LPMD | 2.850.000 | 2.850.000 |
| 03.04.03 |   | Pembinaan PKK | - | 2.000.000 |
| 03.04.04 |   | Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan | - | 2.000.000 |
| 03.04.91 |   | Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat | *-* | *2.000.000* |
| 03.04.92 |   | Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa) | *5.081.500* | *5.081.500* |
| 03.04.93 |   | Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong | *-* | *3.000.000* |
| 03.04.94 |   | Pembinaan RT/RW | 2.550.000 | 2.550.000 |
| 03.04.95 |   | Operasional LPMD dan/atau LPMD | *1.975.000* | *1.975.000* |
| 03.04.96 |   | Operasional PKK | *1.002.500* | *1.002.500* |
| **04** | **BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT** |  | **232.305.785** | **393.305.785** |
| **4.1** | **Bidang kelautan dan perikanan** |  | **88.122.500** | **88.122.500** |
| **4.1.05** |  | Bantuan perikanan(bibit/pakan/dll) | **43.410.000** | **43.410.000** |
| **4.1.94** |  | Pelatihan pengembangan pakan alternatif | **44.712.500** | **44.712.500** |
| **04.02** | **Sub Bidang Pertanian dan Peternakan** |  | 110.263.285 | 110.263.285 |
| 04.02.91 |   | Pelatihan pengolahan hasil pertanian/peternakan | *5.050.000* | *5.050.000* |
| 04.02.92 |   | Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan | *55.495.785* | *55.495.785* |
| 04.03.95 |   | Pelatihan dan pengembangan Pupuk organic | 24.375.000 | 24.375.000 |
| 04.03.96 |   | Pelatihan dan pengembangan pakan ternak stimula/alternatif | 10.865.000 | 10.865.000 |
| 04.03.99 |  | Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 25.000.000 | 25.000.000 |
| **04.03** | **Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa** |  | 30.920.000 | 30.920.000 |
| 04.03.01 |   | Peningkatan Kapasitas Kepala Desa | - | 1.000.000 |
| 04.03.02 |   | Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa | 24.235.000 | 24.235.000 |
| 04.03.03 |   | Peningkatan Kapasitas BPD | 6.685.000 | 6.685.000 |
| **04.04** | **Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Ank dan Keluarga** |  | **1.000.000** | **9.000.000** |
| 04.04.03 |  | Pelatihan dan Penguatan penyandang DIFABEL | - | 2.000.000 |
| 04.04.04 |  | Pembinaan dan Pemberdayaan kelompok rentan | - | 3.000.000 |
| 04.04.96 |  | Penyuluhan/Pembinaan kesehatan reproduksi pada remaja | 0 | 3.000.000 |
| 04.04.99 |  | Pembinaan pola Pengasuhan dan tumbuh bkembang anak | *-* | *4.000.000* |
| **04.06** | **Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal** |  | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 04.06.02 |   | Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes) | 1.000.000 | 1.000.000 |
| **04.07** | **Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian** |  | 2.000.000 | 154.000.000 |
| 04.07.01 |   | Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 04.07.02 |   | Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa | *-* | *150.000.000* |
| 04.07.91 |   | Pengelolaan pasar desa | *-* | *2.000.000* |
|  |  |  |  |  |
| **05** | **BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA** |  | **371.053.615** | **371.053.615** |
| **05.01** | **Sub Bidang Penanggulangan Bencana** |  | 56.153.615 | 56.153.615 |
| 05.01.01 |   | Kegiatan Penanggulanan Bencana | *56.153.615* | *56.153.615* |
| **05.02** | **Sub Bidang Keadaan Darurat** |  | 1.700.000 | 1.700.000 |
| 05.02.01 |   | Penanganan Keadaan Darurat | *1.700.000* | *1.700.000* |
| **05.03** | **Sub Bidang Keadaan Mendesak** |   | *313.200.000* | *313.200.000* |
| 05.03.01 |   | Penanganan Keadaan Mendesak | *313.200.000* | *313.200.000* |

1. **Kebijakan Pembiayaan**

Pembiayaan Kalurahan Kelor Tahun Berjalan 2022, Tahun Proyeksi 2023 dan prakiraan maju tahun 2023, disajikan dalam Tabel 2.3., sebagai berikut:

Tabel 2.3.

Pembiayaan Kalurahan Kelor

Tahun Berjalan 2022 dan Proyeksi 2023

| **Kode Rekening**  | **Usulan/ Program/ Kegiatan**  | **Tahun (Rp 00,-)** | **Ket.** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Berjalan 2022** | **Proyeksi 2023** |
| **3.** | **Pembiayaan**  |  |  |  |
| **3.1.** | **Penerimaan Pembiayaan** |  |  |  |
| 3.1.1. | Sisa Lebih Perhitunggan Anggaran Tahun Sebelumnya  | 110.400.558,31 | 120.000.000 |  |
| 3.2 | Pengeluaran Pembiayaan |  |  |  |
| 3.2.1 | Penyertaan Modal BUMDES | 0 | 200.000.000 |  |
| **Jumlah Pembiayaan** | **110.400.558,31** | **320.000.000** |  |

**BAB III**

**EVALUASI PROGRAM/ KEGIATAN PEMBANGUNAN**

1. **Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Tahun Yang Lalu**

Pelaksanaan program pembangunan tahun yang lalu masih ada program Kalurahan yang belum tercapai dan belum terlaksana dan akan ditindaklanjuti dalam rencana kerja Kalurahan tahun berikutnya baik bidang ekonomi, sosial, budaya maupun sarana dan prasarana.

1. **Identifikasi Masalah Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMDes)**

Kalurahan Kelor banyak potensi yang dimiliki dan merupakan faktor pendorong dalam pembangunan Kalurahan, namun masih belum secara keseluruhan termanfaatkan.

Kendala ataupun permasalahan yang dihadapi, antara lain:

1. Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Kalurahan belum optimal
2. Terbatasnya permodalan, teknologi, informasi pasar, lokasi usaha, jaringan usaha dan kemitraan usaha bagi masyarakat
3. **Identifikasi Masalah Berdasarkan Prioritas Permasalahan Kalurahan**

Arah kebijakan pembangunan Kalurahan Kelor adalah upaya pemerataan pembangunan dalam segala sektor baik ekonomi, sosial, budaya maupun sarana dan prasarana.

Dalam pengambilan prioritas pembangunan masih banyak kendala maupun permasalahan yang dihadapi, antara lain:

1. Bidang ekonomi masih banyak penduduk usia produktif yang tidak punya keterampilan sehingga masih menganggur dan pemerintah Kalurahan belum bisa menciptakan lapangan pekerjaan secara menyeluruh
2. Bidang sosial budaya masih banyak tradisi adat istiadat yang belum terkelola secara optimal sehingga belum bisa menarik secara khusus di bidang pariwisata
3. Bidang sarana dan prasarana seiring dengan peningkatan hasil pertanian masing-masing padukuhan semua memprogramkan pembukaan jalan baru guna memperlancar transportasi hasil panen sehingga masing-masing padukuhan minta didahulukan dalam pengerjaannya sehingga anggaran Kalurahan tidak mencukupi.

Evaluasi rencana kerja pemerintah Kalurahan tahun 2022 disajikan dalam tabel 3.1. berikut ini:

**EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN**

**KALURAHAN KELOR KECAMATAN KARANGMOJO KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN ANGGARAN 2022**

**TABEL 3.1.**

**KALURAHAN KELOR KECAMATAN KARANGMOJO**

**DE EXEL**

**BAB IV**

**RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN KALURAHAN TAHUN 2023**

1. **Prioritas Program dan Kegiatan Skala Kalurahan**

Prioritas program kegiatan pembangunan skala Kalurahan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kode Rekening** | **Bidang/Sub Bidang** | **Jenis Kegiatan** |
|
| **01** | **BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA** |  |
| **10.01.** | **Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Kalurahan** |  |
| 01.01.01 |   | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah  |
| 01.01.02 |   | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong Desa |
| 01.01.03 |   | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa |
| 01.01.04 |   | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) |
| 01.01.05 |   | Penyediaan Tunjangan BPD |
| 01.01.06 |   | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) |
| 01.01.07 |   | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW |
| 01.01.08 |  | Penyediaan Oprasional Pemerintah Desa yang bersumber Dana Desa |
| **01.02** | **Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa** |  |
| 01.03 |  | Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor desa \*\*) |
| 01.02.90 |   | Pengadaan peralatan kerja |
| 01.02.91 |   | Pengadaan mebeleur |
| 01.02.92 |   | Penyediaan jasa perbaikan/servis mebeleur |
| 01.02.94 |   | Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional |
| 01.02.95 |   | Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja |
| 01.01.99 |   | Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintah Desa |
| **01.03** | **Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan** |  |
| 01.03.02 |   | Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa \*\*) |
| 01.03.90 |   | Penyusunan monografi desa |
| 01.03.91 |   | Pendataan keluarga/rumah tangga miskin |
| 01.01.99 |  | Lain-Lain  |
| **01.04** | **Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan** |  |
| 01.04.01 |   | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) |
| 01.04.02 |   | Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) |
| 01.04.03 |   | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) |
| 01.04.04 |   | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) |
| 01.04.05 |   | Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa |
| 01.04.06 |   | Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan) |
| 01.04.07 |   | Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat |
| 01.04.08 |   | Pengembangan Sistem Informasi Desa |
| 01.04.90 |   | Penyusunan laporan keuangan bulanan/SPJ dan semesteran |
| 01.04.96 |   | Monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan |
| **01.05** | **Sub Bidang Pertanahan** |  |
| 01.05.06 |  | Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan |
| 01.05.94 |   | Intensifikasi pemungutan pajak daerah /PBB |
| **02** | **BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA** |  |
| **02.01** | **Sub Bidang Pendidikan** |  |
| 02.01.01 |   | Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) |
| 02.01.02 |   | Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst) |
| 02.01.04 |   | Pemeliharaan Sarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa |
| 02.01.08 |   | Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca) |
| 02.01.90 |  | Rehab/pembangunan gedung PAUD milik Desa |
| **02.02** | **Sub Bidang Kesehatan** |  |
| 02.02.02 |   | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) |
| 02.02.03 |   | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) |
| 02.02.04 |   | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan |
| 02.02.09 |   | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD \*\* |
| 02.02.91 |   | Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) |
| 02.02.92 |   | Pembinaan taman obat keluarga (Toga) |
| 02.02.94 |   | Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD |
| 02.02.98 |   | Insentif kader kesehatan/KB |
| **02.03** | **Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** |  |
| 02.03.01 |   | Pemeliharaan Jalan Desa |
| 02.03.02 |   | Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukim/Gang |
| 02.03.09 |   | Pemelharaan Monumen/Gapura/Batas Desa |
| 02.03.11 |   | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman \*\*) |
|  02.03.12 |   | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani \*\*) |
| 02.03.14 |   | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) |
| 02.03.15 |   | Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Balai desa/Balai Kemasyarakatan \*\*) |
| 02.03.18 |  | Penyusunan Perencanaan tata ruang Desa |
|  |  |  |
| **02.04** | **Sub Bidang Kawasan Pemukiman** |  |
| **02.04.14** |  | **Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum,dll\*\*)** |
| 02.04.16 |   | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah \*\*) |
| 02.04.93 |   | Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengolahan sampah |
| 02.04.91 |   | Pemberian stimulan jamban sehat |
| **02.06** | **Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika** |  |
| 02.06.02 |   | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) |
| **02.08** | **Sub Bidang Pariwisata** |  |
| 02.08.02 |  | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan sarana prasarana Pariwisata Milik Desa\*\*) |
| **03** | **BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN** |  |
| **03.01** | **Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat** |  |
| 03.01.03 |   | Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa |
| 03.01.90 |   | Pembinaan kelembagaan Tangguh Bencana |
| 03.01.93 |  | Pembinaan Jaga Warga |
| **03.02** | **Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan** |  |
| 03.02.01 |   | Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa |
| 03.02.03 |   | Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) |
| 03.02.04 |   | Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Desa |
| 03.02.90 |   | Pemberian stimulant kegiatan keagamaan |
| 03.02.92 |   | Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa |
| 03.02.93 |   | Pembinaan dan pengembangan sanggar seni budaya |
| **03.03** | **Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga** |  |
| **03.03.90** |  | Pelaksanaan peringatan hari besar nasional |
| 03.03.93 |   | Operasional Karang Taruna |
| **03.04** | **Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat** |  |
| 03.04.02 |   | Pembinaan LKMD/LPM/LPMD |
| 03.04.03 |   | Pembinaan PKK |
| 03.04.04 |   | Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan |
| 03.04.91 |   | Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat |
| 03.04.92 |   | Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa) |
| 03.04.93 |   | Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong |
| 03.04.94 |   | Pembinaan RT/RW |
| 03.04.95 |   | Operasional LPMD dan/atau LPMD |
| 03.04.96 |   | Operasional PKK |
| **04** | **BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT** |  |
| **4.1** | **Bidang kelautan dan perikanan** |  |
| **4.1.05** |  | Bantuan perikanan(bibit/pakan/dll) |
| **4.1.94** |  | Pelatihan pengembangan pakan alternatif |
| **04.02** | **Sub Bidang Pertanian dan Peternakan** |  |
| 04.02.91 |   | Pelatihan pengolahan hasil pertanian/peternakan |
| 04.02.92 |   | Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan |
| 04.03.95 |   | Pelatihan dan pengembangan Pupuk organic |
| 04.03.96 |   | Pelatihan dan pengembangan pakan ternak stimula/alternatif |
| 04.03.99 |  | Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan |
| **04.03** | **Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa** |  |
| 04.03.01 |   | Peningkatan Kapasitas Kepala Desa |
| 04.03.02 |   | Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa |
| 04.03.03 |   | Peningkatan Kapasitas BPD |
| **04.04** | **Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Ank dan Keluarga** |  |
| 04.04.03 |  | Pelatihan dan Penguatan penyandang DIFABEL |
| 04.04.04 |  | Pembinaan dan Pemberdayaan kelompok rentan |
| 04.04.96 |  | Penyuluhan/Pembinaan kesehatan reproduksi pada remaja |
| 04.04.99 |  | Pembinaan pola Pengasuhan dan tumbuh bkembang anak |
| **04.06** | **Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal** |  |
| 04.06.02 |   | Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes) |
| **04.07** | **Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian** |  |
| 04.07.01 |   | Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa |
| 04.07.02 |   | Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa |
| 04.07.91 |   | Pengelolaan pasar desa |
|  |  |  |
| **05** | **BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA** |  |
| **05.01** | **Sub Bidang Penanggulangan Bencana** |  |
| 05.01.01 |   | Kegiatan Penanggulanan Bencana |
| **05.02** | **Sub Bidang Keadaan Darurat** |  |
| 05.02.01 |   | Penanganan Keadaan Darurat |
| **05.03** | **Sub Bidang Keadaan Mendesak** |   |
| 05.03.01 |   | Penanganan Keadaan Mendesak |

Prioritas program dan kegiatan skala Kalurahan tahun 2023 disajikan dalam tabel 4.1. sebagai berikut:

**PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KALURAHAN (SKALA KALURAHAN TAHUN 2023)**

**KALURAHAN KELOR**

**KECAMATAN KARANGMOJO**

**DI EXEL**

1. **Prioritas Program dan Kegiatan Skala Kabupaten, Propinsi, dan Pusat Tahun 2023-2024**

Prioritas program dan kegiatan skala Kabupaten, Propinsi, dan Pusat Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. **INFRASTRUKTUR**
2. Rehab/Pembangunan Jembatan Slametan
3. Pemasangan Lampu Jalan Umum
4. Pengaspalan Jalan Poros Kalurahan
5. Pengaspalan Jalan Penghubung Antar Kalurahan
6. Jalan Usaha Tani
7. Cor Rabat
8. Saluran Irigasi
9. Selokan Jalan Kalurahan
10. Selokan Jalan Kecamatan
11. Talud Jalur 1 (Kalurahan)
12. Cross Way
13. Bendungan/ Cek DAM
14. Pembuatan Sumur Bor
15. Rehab Pasar Kalurahan
16. Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi
17. Rehab Rumah Tidak Layak Huni
18. **EKONOMI**
19. Pelatihan kewirausahaan dan bantuan modal usaha mikro kecil menengah
20. Penguatan modal kelompok usaha kecil produktif dan koperasi
21. Bantuan pembuatan ijin produksi makanan olahan
22. Bantuan modal usaha penggemukan sapi
23. Bantuan bibit ternak kambing
24. Bantuan modal dan pelatihan budidaya perikanan
25. Bantuan sarana dan prasarana perikanan : mesin pelet, mesin pompa, wadah pembibitan
26. Bantuan tong sampah dan alat pemilah sampah
27. Pelatihan kewirausahaan dan bantuan modal usaha mikro kecil menengah
28. Bantuan alat dan pelatihan peningkatan kualitas produksi kerajinan, pertukangan
29. Pengembangan tanaman buah-buahan dan sayuran
30. Bantuan alat pengendali hama Hand Sprayer
31. Pengelolaan sanitasi limbah
32. Bantuan program pengembangan biogas
33. Bantuan KUBE
34. Bantuan pupuk dan obat-obatan
35. Bantuan benih padi, kedelai, jagung
36. Pembinaan kelompok tani dan pendampingan modal
37. Bantuan pengadaan mesin pertanian (Hand Traktor, Tresser)
38. Bantuan alat pengelola produksi kelapa, kedelai, kakao, mete
39. Bantuan bibit tanaman rakyat
40. Bantuan modal kelompok budidaya kambing
41. **PENDIDIKAN, SOSIAL BUDAYA DAN PEMERINTAHAN UMUM**
42. Perbaikan gizi balita
43. Penyemprotan/ foging sarang nyamuk
44. Stimulan Jamban Sehat
45. Stimulan RTLH
46. Pengadaan pakaian reog dan gamelan slendro
47. Bantuan upacara adat bersih Kalurahan
48. Bantuan seperangkat kelengkapan kesenian, karawitan, seni terbangan, pedalangan, ketoprak
49. Sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/ SPS
50. Pelatihan kursus: bengkel, kecantikan, stir mobil, home industri, tata boga, potong rambut
51. Pengembangan produktifitas dan pelatihan kewirausahaan
52. Pelatihan pembuatan kerajinan tangan
53. Pengadaan sarana dan prasarana olahraga (lapangan tenis meja dan set volly ball)
54. Pengadaan sarana TPA/ SM
55. Pelatihan sertifikasi hasil olahan dan keamanan pangan
56. Pelatihan pertanian SL-PHT/SL-PTT/LL-PTT
57. Pengadaan perpustakaan Kalurahan dan padukuhan
58. Pengadaan sarana dan prasarana posyandu lansia
59. Pengadaan sarana dan prasarana posyandu
60. Pengadaan genteng kaca bagi RTM

**BAB V**

**PENUTUP**

Rancangan RKP Kalurahan merupakan pedoman bagi pemerintah Kalurahan dalam penyusunan Rancangan APBKalurahan maupun pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan RPJMKalurahan.

Penyusunan RKP Kalurahan melibatkan keterwakilan dari semua unsur Lembaga Kalurahan. Dokumen RRKP Kalurahan diharapkan dapat dipergunakan sebagai acuan kerja yang akan dilaksanakan dalam kurun

waktu satu tahun, sehingga kegiatan pembangunan akan memberikan manfaat bagi kinerja Pemerintah Kalurahan maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalurahan Kelor.

Kelor, 22 Nvember 2022

 Lurah,

**SURATMAN**